

Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan keuangan Desa: Implikasi terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara

¹Yakub Dunggio, ²Titin Dunggio, ³Darman

^{1,2,3}Universitas Bina Mandiri Gorontalo– Indonesia

Email: dunggio.yakub@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan keuangan desa dan bagaimana pengaruhnya terhadap mutu pelayanan publik di Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi dokumentasi. Lokasi penelitian dipilih secara purposive dengan mengacu pada kategori desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), yakni desa Mandiri, Maju, dan Berkembang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat formalitas dan belum menyentuh aspek substansi. Keterlibatan warga lebih terfokus pada kehadiran dalam forum musyawarah, namun tidak diiringi dengan peran aktif dalam proses pengawasan maupun pengambilan keputusan. Faktor-faktor seperti keterbatasan akses informasi, rendahnya kapasitas masyarakat, dan kurangnya inisiatif pemerintah desa dalam menciptakan ruang partisipasi yang terbuka turut menjadi kendala utama. Akibatnya, kualitas pelayanan publik belum tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas masyarakat, keterbukaan informasi, serta penguatan komitmen pemerintah desa guna menciptakan tata kelola keuangan desa yang lebih inklusif, partisipatif, dan akuntabel.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat; Perencanaan Keuangan Desa, Pelayanan Publik; Transparansi; *Good Governance*

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa memainkan peran yang signifikan dalam mendorong pembangunan nasional, khususnya melalui tata kelola keuangan desa yang mengutamakan transparansi, keterlibatan warga, dan akuntabilitas. Seperti yang dikemukakan oleh Suharto (2005), partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu proses aktif di mana warga berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan serta pengelolaan sumber daya. Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin memperkuat posisi desa dengan memberikan otonomi lebih dalam mengatur dan mengelola kepentingan lokal, termasuk dalam aspek penganggaran dan perencanaan keuangan.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan keuangan desa tidak hanya merefleksikan praktik demokrasi di tingkat lokal, namun juga menjadi bagian integral dari prinsip-prinsip *good governance*. Menurut UNDP (1997), tata kelola yang baik mencakup unsur-unsur seperti partisipasi, akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan keadilan. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran desa dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah desa serta meningkatkan legitimasi pembangunan yang dijalankan.

Kecamatan Sumalata, yang berada di Kabupaten Gorontalo Utara, merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi sosial yang cukup besar. Meski demikian, efektivitas perencanaan serta pemanfaatan dana desa di wilayah ini masih menemui berbagai kendala. Mengacu pada teori *Ladder of Citizen Participation* dari Arnstein (1969), tingkat keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan sering

kali masih bersifat simbolis (tokenisme), di mana partisipasi hanya bersifat formal dan tidak berdampak nyata terhadap hasil kebijakan.

Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Ismanto (2019) dan Wahyudi (2021), mengungkapkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan keuangan desa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya edukasi dan informasi kepada warga, terbatasnya kapasitas masyarakat dalam memahami proses perencanaan, serta dominasi pihak aparat desa dalam forum-forum musyawarah. Keadaan ini berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik, baik dari segi kemudahan akses, pemerataan layanan, maupun tingkat kepuasan masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana partisipasi masyarakat dalam perencanaan keuangan desa di Kecamatan Sumalata serta menganalisis dampaknya terhadap kualitas layanan publik. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa yang lebih inklusif dan berorientasi pada pelayanan publik yang efektif.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan keuangan desa serta pengaruhnya terhadap pelayanan publik di Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Lokasi penelitian dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan klasifikasi desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), meliputi desa Mandiri, Maju, dan Berkembang.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, dengan informan meliputi kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan warga desa.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. Proses analisis mengikuti tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan sesuai metode Miles dan Huberman (1994). Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai variasi partisipasi masyarakat serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sumalata masih bersifat formal dan belum mencapai tingkat yang substansial. Hal ini berarti keterlibatan warga cenderung terbatas pada aspek prosedural, seperti kehadiran dalam musyawarah desa, tanpa keterlibatan aktif dalam pengawasan dan pemanfaatan hasil pembangunan. Kondisi tersebut mencerminkan rendahnya akuntabilitas dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut Arnstein (1969) dalam konsep *Ladder of Citizen Participation*, tingkat partisipasi yang rendah atau tokenisme hanya memberikan ruang partisipasi simbolis tanpa pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan. Situasi ini berpotensi melemahkan peran masyarakat dalam pengawasan sosial sehingga pengelolaan dana desa menjadi kurang optimal.

Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan berisiko menimbulkan ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran desa dan menurunkan kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. Fung (2006) menegaskan bahwa partisipasi yang efektif harus melibatkan warga secara aktif dalam pengambilan keputusan dan evaluasi, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Peningkatan kapasitas masyarakat menjadi faktor penting untuk memperbaiki kualitas partisipasi. Chambers (1997) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan dapat mendorong partisipasi yang lebih

berarti dan berdampak. Selain itu, akses informasi yang terbuka sangat diperlukan agar warga dapat mengawasi penggunaan dana desa dengan baik. World Bank (2004) menegaskan bahwa transparansi dan akses informasi merupakan prasyarat utama tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Komitmen pemerintah desa dalam menyediakan ruang partisipasi yang inklusif juga menjadi kunci sukses. Putnam (1993) menyatakan bahwa kepercayaan sosial merupakan modal sosial yang penting untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui tindakan nyata, bukan hanya formalitas dalam forum musyawarah.

Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa yang transparan dan partisipatif mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, sesuai prinsip *good governance* yang menekankan partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi (UNDP, 1997). Sinergi antara penguatan kapasitas masyarakat, akses informasi, dan komitmen pemerintah desa akan menghasilkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Kecamatan Sumalata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa masih didominasi oleh aspek formalitas dan belum mencapai tingkat partisipasi yang substantif. Keterlibatan warga sebagian besar terbatas pada kehadiran dalam forum-forum musyawarah desa, namun belum disertai dengan kontribusi nyata dalam pengambilan keputusan, pengawasan pelaksanaan program, maupun dalam evaluasi pemanfaatan dana desa. Hal ini mencerminkan masih lemahnya pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi partisipatif di tingkat desa.

Minimnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa berdampak pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Dalam konteks tata kelola yang baik (*good governance*), kondisi ini menjadi indikasi belum optimalnya implementasi prinsip-prinsip partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas sebagaimana dianjurkan oleh UNDP (1997). Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya kualitas partisipasi antara lain adalah keterbatasan pengetahuan dan kapasitas teknis masyarakat dalam memahami perencanaan keuangan desa, kurangnya akses terhadap informasi publik yang relevan dan terbuka, serta lemahnya inisiatif dan komitmen dari pemerintah desa untuk membangun ruang dialog yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa ada kecenderungan bahwa forum musyawarah hanya digunakan sebagai sarana legitimasi formal, bukan sebagai wadah deliberatif yang mengakomodasi kepentingan warga secara luas. Akibat dari partisipasi yang bersifat simbolik ini adalah pelayanan publik yang dihasilkan tidak sepenuhnya berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, sehingga kualitasnya menjadi kurang memuaskan baik dari sisi akses, pemerataan, maupun kepuasan pengguna layanan.

Dengan demikian, diperlukan reformulasi pendekatan dalam pengelolaan keuangan desa yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Hal ini mencakup upaya peningkatan kapasitas warga melalui edukasi publik, penyediaan informasi yang mudah diakses dan dipahami, serta pembukaan ruang partisipatif yang lebih luas dan bermakna. Tanpa adanya pergeseran dari partisipasi simbolik menuju partisipasi substansial, maka pengelolaan dana desa akan terus menghadapi tantangan dalam mencapai efisiensi, efektivitas, dan keadilan sosial

SARAN

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang lebih substansial dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sumalata, diperlukan sejumlah langkah strategis. Pertama, penguatan kapasitas masyarakat harus menjadi prioritas, baik melalui pelatihan, sosialisasi, maupun pendampingan yang berkelanjutan, agar warga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam memahami proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan keuangan desa. Kedua, akses terhadap informasi publik perlu diperluas dengan menyediakan data keuangan desa secara terbuka, mudah diakses, dan dipahami oleh masyarakat. Ketiga, forum musyawarah desa harus didesain lebih inklusif dan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat, bukan sekadar menghadirkan perwakilan secara formal. Keempat, pemerintah desa perlu menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui tindakan nyata, seperti pelaporan rutin, pelibatan warga dalam monitoring, dan responsif terhadap kritik serta masukan. Terakhir, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh lokal perlu diperkuat guna membangun budaya partisipatif dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. London: Intermediate Technology Publications.
- Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. *Public Administration Review*, 66, 66–75. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x>
- Ismanto, A. (2019). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(1), 45–52.
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- UNDP (United Nations Development Programme). (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. New York: United Nations Development Programme.
- Wahyudi, T. (2021). Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan keuangan desa dan dampaknya terhadap kualitas layanan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 123–132.
- World Bank. (2004). *World development report 2004: Making services work for poor people*. Washington, DC: World Bank and Oxford University Press.